

RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP RAZIA SATPOL PP DI PASAR SENTRAL KOTA LAMA KENDARI¹*Irfan Rahmad Husain²**La Ode Topo Jers³**Rahmat Sewa Suraya⁴***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk resistensi pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kota Lama terhadap razia Satpol PP. Dalam penelitian ini menggunakan teori resistensi yang saling bersangkutan dengan obyek yang akan di teliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode etnografi dengan pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengamatan (*observasion*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi PKL terhadap razia Satpol PP disebabkan oleh masalah ekonomi serta minimnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Kendari. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya sektor informal yang berupaya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Namun demikian, keberadaan dan aktivitas PKL ini melanggar Perwali Kota Kendari tentang UU No 13 Tahun 2008 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut cenderung mengakibatkan timbulnya upaya resisten dari PKL di Kota Kendari terhadap UU Perwali serta razia yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP.

Kata kunci : resistensi, PKL razia, Satpol PP

ABSTRACT

This study aims to determine and to describe the form of street vendors resistance in Old City Central Market against Civil Service Police Razia. This study uses the theory of resistance. It interrelates with the object to be examined. In addition, this study also uses both ethnographic methods and data collection by using observation techniques and in-depth interviews. The informant selection technique is done by purposive sampling. The results of this study indicate that the street vendors resistance to Civil Service Police is caused by economic problems and the lack of jobs created by the Kendari City Government. This condition causes many informal sectors to try to create their own jobs by becoming street vendors, so they can meet their economic needs. However, the existence and activities of street vendors violate the Kendari City Government regarding Law No. 13 of 2008 concerning the Arrangement of Street Vendors. It tends to result in the emergence of resistance efforts from street vendors in the City towards the Perwali Law and Razia that carried out by the Civil Service Police.

Keywords: *resistance, street vendors, razia, civil service police.*

¹ Hasil Penelitian

² Alumni Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: irfan.rahmat@yahoo.co.id

³ Dosen pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: topo.jers@uho.ac.id

⁴ Dosen pada Fakultas Ilmu Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: rahmat.sewasuraya@uho.ac.id

A. PENDAHULUAN

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Kendari juga menyediakan banyak lapangan pekerjaan yang diminati oleh penduduknya baik dari dalam maupun para pendatang dari luar Kota Kendari yang ada di Sulawesi Tenggara. Banyaknya lapangan pekerjaan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Kota Kendari dapat bekerja berdasarkan dalam bidang dan pilihannya masing-masing. Namun, dengan meningkatnya migrasi penduduk dari daerah lain, menyebabkan jumlah pengangguran semakin bertambah di Kota Kendari. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat di Kota Kendari selalu bersaing dalam bidang industri, salah satunya dengan menjadi pedagang kaki lima, hal tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Kota Kendari sebagai kota perdagangan, juga terlihat dengan tersedianya sarana industri perbelanjaan seperti pasar, sehingga para penduduknya dapat memenuhi kebutuhan untuk berbelanja dan melakukan transaksi. Pasar sebagai salah satu transaksi jual beli yang mudah dijumpai di setiap kota maupun di desa, dan menjadi salah satu tempat masyarakat untuk melakukan transaksi. Salah satu pasar di Kota Kendari terletak di wilayah Kota Lama, yang tidak jauh dari pelabuhan Nusantara Kota Kendari. Letak pasar yang dekat dengan pelabuhan membuat pasar ini menjadi tempat yang strategis bagi sektor informal untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Hal ini menyebabkan jalur lalu lintas dari arah atau menuju ke pelabuhan menjadi terganggu. Akibat terganggunya lalu lintas di pasar kota, pemerintah mengeluarkan peraturan terhadap larangan berjualan pada lokasi-lokasi yang telah di tentukan berdasarkan Peraturan Walikota No, 13 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Dalam UU Perwali menjelaskan secara jelas bahwa permasalahan ketertiban umum dan gangguan lalu lintas yang diaki-

batkan pedagang kaki lima yang menempati ruang publik, pada lokasi yang menjadi obyek penelitian, penulis juga melihat beberapa fakta yang terjadi di lapangan dengan Perwali Kota Kendari, bahwa para PKL yang menggunakan badan jalan sebagai pijakan untuk berjualan memang sangat menghambat arus lalu lintas yang lalu lalang di jalan tersebut. Hal ini di karenakan mereka hanya mempunyai modal yang pas-pasan dan ketidakmampuan dalam menyewa tempat untuk berjualan. Namun, dengan cara demikian mereka dapat mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Orang-orang yang melakukan kegiatan ini dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima (PKL). Di Kota Kendari, Pedagang Kaki Lima sudah lama dikenal. Menjadi pedagang kaki lima merupakan suatu pekerjaan yang mudah untuk dikerjakan, bagi sektor informal dan masyarakat kalangan bawah biasanya memilih menjadi PKL untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, dalam hasil pengamatan penulis juga mengetahui bahwa telah terjadi konflik antara PKL dengan pihak pengamanan yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara pedagang kaki lima dengan aparat pemerintah. Hal ini terjadi karena ada suatu bentuk resistensi pedagang kaki lima terhadap aparat pemerintah yang sa-ling rebutan barang serta pengambilan barang dagangan secara paksa, sehingga para PKL harus mempertahankan barang jualan mereka.

Para pedagang kaki lima melakukan resistensi atau melakukan perlawanan untuk mempertahankan dagangan yang menjadi satu-satunya sumber utama penghasilan hidup mereka. Tindakan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima ini, merupakan sebuah bentuk perjuangan yang biasa namun dilakukan terus menerus. Pada saat diadakan penertiban, para pedagang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan perilaku yang tidak sopan kepada para petugas Satpol PP sehingga terjadi perke-

lahian. Alasan para PKL mengeluarkan bahasa yang tidak sopan, karena barang-barang dagangan mereka di ambil secara paksa dan dibawa ke Kantor Satpol PP, dan untuk mengambil barang-barang dagangan tersebut para PKL harus membayarnya kepada petugas Satpol PP. Oleh karena itu, para PKL sering kali mengadakan perlawanan kepada petugas Satpol PP ketika terjadi razia di Pasar Sentral Kota Lama.

Resistensi yang dilakukan oleh PKL seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan konsep resistensi yang dikemukakan oleh Scoot bahwasanya resistensi sehari-hari (*every day forms of resistance*), merupakan perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus. Michael Hardt dan A. Negri (2004) dalam bukunya yang berjudul *War and Democracy in the Age of Empire*, menyebutkan bahwa resistensi memiliki bentuk yang berbeda-beda sepanjang sejarah dan hal ini terjadi secara garis besar karena adanya perubahan di dalam masyarakat. Secara spesifik, perubahan bentuk resistensi ini konvergen dengan perubahan dalam struktur buruh dan bentuk organisasi produksi masyarakat, karena pada dasarnya struktur buruh dan bentuk organisasi produksi akan membentuk komposisi masyarakat dan resistensi muncul dari masyarakat sendiri. Bagaimana struktur buruh dan bentuk organisasi produksi membentuk komposisi masyarakat dapat dipahami secara sederhana melalui kelas-kelas sosial di dalam masyarakat yang sering kali dikategorikan dengan kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Beberapa penelitian juga telah diuraikan mengenai hal yang bersangkutan.

Penelitian Mochammad Fadoli (2011), yang berjudul "Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo". Dalam hasil penelitian ini membahas tentang keberadaan kaki lima yang menimbulkan berbagai persoalan di kawasan Kecamatan Sukolilo, yang antara lain ketidaknyamanan yang dialami para

pemakai jalan karena banyaknya trotoar dikuasai oleh pedagang kaki lima, kekumuhan dan tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas umum sebagaimana mestinya, seperti taman, dan trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang oleh pedagan kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang demikian membuat pemerintah Kecamatan Sukolilo melakukan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima di kota Surabaya berdasarkan Perda No.17 tahun 2003 dengan tujuan untuk memandirikan PKL dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh PKL.

Penelitian Benjamin (2013), yang berjudul, "Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta". Dalam hasil penelitian ini membahas tentang peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Malioboro telah sesuai dengan Perwali Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010, yaitu dengan melakukan pemeliharaan kebersihan dengan memilah limbah dan membuang limbah ke tempat buangan limbah yang dihasilkan. Di samping itu, pedagang kaki lima membayar retribusi limbah untuk penyedotan limbah cair di kawasan Malioboro. Kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro adalah terhalangnya penyedotan limbah cair karena adanya kendaraan bermotor yang diparkir di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut.

Penelitian Siswono yang berjudul "Resistensi dan Akomodasi: Suatu Kajian Tentang Hubungan-Hubungan Kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima (PKL), Preman dan Aparat di Depok". Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai resistensi pedagang kaki lima akibat Peraturan Daerah (Perda). Ia menekankan bagaimana relasi kuasa terjalin diantara tiga komponen

dalam melakukan strategi untuk menguatkan kontrol atas lahan trotoar. Ia memakai Gidden untuk menjelaskan praktek sosial antara mereka, oleh sebab itulah menandai bekerjanya kekuasaan akibat hubungan antara struktur dan agensi. Resistensi terjadi karena Perda yang menurut para pedagang PKL tidak sesuai dengan realitas yang harus mereka hadapi.

Penelitian Purwanti (2012) menuliskan “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam penertiban dan pembinaan PKL di Kabupaten Lumajang masih belum sepenuhnya. Penertiban yang dilakukan pemerintah ada yang pro dan ada yang kontra, penolakan relokasi PKL di Taman Mini dan seputar Alun-alun Lumajang, ke Arena Artagama, menimbulkan ketidakpuasan para PKL sehingga melakukan demo sebagai wujud penolakan tindakan pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun pemerintah tetap melakukan relokasian para tempat aktivitas PKL.

Selanjutnya, Hasibuan (2013) juga melakukan penelitian “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan adalah dengan melakukan kajian operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil, melakukan patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patrol kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.

Erlinda (2014) menulis “Kajian Yudiris Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik di Wilayah Kabupaten Jember.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Jawa Kabupaten Jember adalah karena tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang memberi izin bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di fasilitas umum.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang juga membahas tentang Resistensi dan Akomodasi Suatu Kajian Tentang Hubungan-Hubungan Kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima (PKL), Preman dan Aparat di Depok, Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukoliko, Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan, Kajian Yudiris Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik di Wilayah Kabupaten Jember, Kehidupan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perempuan. Studi pada Penjualan Pakaian bekas (RB) di Pasar Baru Wua-wua Kota Kendari. Sementara dalam penelitian ini akan membahas tentang resistensi yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap razia Satpoll PP di Pasar Sentral Kota Lama Kendari. Selain itu penelitian ini juga meneliti tentang terjadinya resistensi dan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh PKL dalam

mempertahankan ruang publik sebagai tempat dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya resistensi pedagang kaki lima terhadap Razia Satpol PP dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk resistensi pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kota Lama Kendari terhadap Razia Satpol PP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Jalan Tinumbu belakang Pasar Sentral Kota Lama Kendari. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan, bahwa lokasi tersebut terdapat pedagang kaki lima yang berjualan sekian lama dan selalu berjualan setiap hari dilokasi yang sama serta mereka juga melakukan resistensi terhadap razia yang dilakukan oleh oknum Satpol PP dan menolak untuk direlokasi atau dipindahkan ke dalam pasar.

Penentuan informan ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Teknik tersebut adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Spradley (1997) menyatakan bahwa sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut ; 1). Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga situasi itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya; 2). Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Informan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu informan kunci dan informan biasa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik penelitian lapangan (*field work*) dengan menggunakan metode pengamatan (*observation*) dan Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*). Pengamatan dilakukan dengan sasaran peneli-

tian selama dua bulan, yakni bulan Agustus dan Oktober. Peneliti melakukan pengamatan pertama pada akitvitas pedagang kaki lima pada tanggal 13 Agustus yang bertepatan pada hari minggu, dimana pada hari ini para pedagang kaki lima bebas berjualan tanpa adanya pengawasan petugas dari oknum Satpol PP. dan pada hari-hari berikutnya khususnya hari senin peneliti kembali turun kelapangan guna melihat kembali aktifitas pedagang kaki lima. Pada tanggal 17 September peneliti kembali kelapangan secara resmi dengan menunjukan surat penelitian kepada pedagang kaki lima agar mereka mampu diajak untuk bekerjasama dalam penelitian ini tanpa kendala.

Wawancara (*Interview*) yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar dapat diperoleh data yang lengkap sesuai yang diperlukan dari setiap informan dengan menggunakan Pedoman Wawancara (*Interview Guide*) yang telah dibuat.

Pedoman wawancara ini dibuat untuk mengetahui hal-hal apa saja yang akan ditanyakan agar peneliti lebih fokus pada inti permasalahan dan dikembangkan sesuai jawaban-jawaban dari informan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan tatap muka langsung serta melakukan tanya jawab kepada informan. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan untuk mendapatkan data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara berstruktur kemudian dikembangkan dalam wawancara lebih mendalam dalam rangka mengungkap permasalahan PKL dalam melakukan resistensi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan mengenai resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap razia Satpol PP di jalan yang dilakukan terus-menerus bahkan bertahun-tahun. Analisis

data dilakukan terus menerus sejak awal penelitian hingga penelitian ini selesai ditulis atau dilaporkan. Artinya setiap ada perkembangan informasi, peneliti selalu kembali bertanya kepada informan dan informasi tersebut menjadi pelengkap dari hasil penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Terjadinya Resistensi Pedagang kaki Lima

Resistensi (perlawanan) merupakan suatu sikap untuk berperilaku bertahan melawan, menentang atau upaya tindakan dilakukan oleh masyarakat kecil untuk bertahan dari suatu tindakan-tindakan yang dapat membuat mereka tertekan. Para pedagang kaki lima mempunyai beberapa strategi atau tehnik untuk menghadapi suatu tekanan tersebut. Hal itu mereka wujudkan dalam bentuk *resistensi* dalam proses razia yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam upaya Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Walikota No, 13 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang selalu bertentangan dengan para PKL. Mereka beranggapan bahwa mereka telah dianak tirikan oleh adanya perwali tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi mereka saat ini.

Kebanyakan pedagang kaki lima yang menjadi informan dari penelitian ini, mempunyai alasan yang sama, seperti keterbatasan modal adalah salah satu kendala besar bagi mereka untuk membangun ataupun menyewa tempat usaha. PKL menggunakan ruang publik sebagai tempat usaha mereka, sektor informal ini melihat banyaknya peluang yang ada dan memanfaatkan ruang publik sebagai tempat yang lebih mudah untuk menarik para pembeli dan pengguna jalan lain agar membeli dagangan mereka.

a. Mempertahankan Tempat Usaha

Sebagai pedagang kaki lima yang legal dibutuhkan modal yang cukup besar, hal ini dikarenakan pedagang harus menyewa atau membeli tempat usaha yang strate-

gis untuk lokasi berjualan yang telah disediakan pemerintah. Semakin strategis tempat untuk berjualan maka semakin mahal pula harga sewa dan jualnya. Sedangkan pedagang kaki lima ilegal tidak membutuhkan modal yang besar untuk usahanya. Hal ini dikarenakan para pedagang kaki lima ilegal menempatkan barang dagangan mereka disembarang tempat yang mereka anggap strategis. Ditambah lagi dengan gerobak dorong, mereka dapat memindahkan barang dagangan mereka dimanapun dan kapanpun mereka mau.

Kehadiran Pasar Sentral bergaya modern, tidak sesuai dengan harapan para pedagang yang dulunya menjual di pasar tradisional, biaya sewa yang mahal sehingga mereka tidak mampu untuk menyewanya sehingga tidak heran banyak penjual yang berjualan di lahan parkir seperti penjual sayur dan penjual ikan, tidak hanya menggunakan lahan parkir pedagang ini juga memanfaatkan badan jalan untuk berjualan. Namun tidak hanya penjual ikan dan sayur saja, tetapi dalam sektor informal ini juga terdapat para pedagang kaki lima yang berjualan jenis-jenis dagangan lainnya. Mereka memanfaatkan kondisi jalan yang ramai dilalui para pembeli yang ingin dan telah berbelanja di pasar modern untuk berjualan di emperan jalan raya, dengan Pasar modern sebagai latarnya serta menggunakan ruang publik agar mendapatkan keuntungan. Para PKL ini menciptakan daya tarik terhap pelanggan yang hendak atau telah berkunjung di pasar untuk mampir ke warung di mana mereka berjualan.

b. Alasan Menjadi PKL

Sempitnya lapangan kerja serta rendahnya tingkat pendidikan, menjadikan hal tersebut sebagai salah satu penyebabnya peningkatan jumlah pengangguran, peluang kerja yang sangat minim serta pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya menjadikan suatu permasalahan yang sulit ditanggulangi, sehingga masalah ekonomi pun menjadi suatu kendala bagi manusia yang pada kenyataannya, kebutuhan

manusia jumlahnya tidak terbatas dan kebutuhan setiap orang pun berbeda-beda. Sementara itu, lapangan kerja sangat minim dan terbatas akibat terus bertambahnya jumlah pengangguran yang tidak sesuai dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Namun, yang menjadi persoalan lain bagi para pengangguran, yaitu kebanyakan pekerjaan yang terbuka memiliki standar penerimaan yang tidak sesuai bagi sebagian atau lebih dari para pengangguran yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Salah satu syarat yang sering menjadi kendala bagi sebagian atau lebih pengangguran, yaitu standar pendidikan yang tinggi.

Menjadi pedagang merupakan suatu hal yang mudah untuk di kerjakan, hal inilah yang banyak ditekuni oleh sektor informal untuk mencari kesibukkan ataupun kerja untuk mendapatkan uang. Kebanyakan pedagang kaki lima yang di jumpai adalah pria ataupun ibu-ibu yang sudah menikah dan berkeluarga, mereka kesulitan mencari kerja dalam bidang tertentu selain itu umur dan kendaraan mejadi faktor kendala bagi mereka, adanya tenaga kerja yang dibutuhkan biasanya tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan jika di bandingkan dengan berdagang, mereka biasa mendapatkan dua kali lipat dari modal yang di keluarkan, tidak heran menjadi pedagang merupakan usaha yang menjajikan di kalangan sektor informal.

2. Bentuk-Bentuk Resistensi

Bentuk resistensi dari para pedagang kaki lima sangat beragam, hal ini dapat dilihat dari bentuk ketidakpatuhan mereka terhadap peraturan dari pemerintah dan penolakan terhadap kondisi yang mereka tidak sukai. Bentuk *resistensi* secara diam-diam atau terselubung dari eksploitasi lebih umum dari pada melawan secara terang-terangan. Resistensi rakyat menurut Scott (2003) dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu resistensi yang disebabkan oleh penyebab secara langsung dan penyebab tidak langsung. Resistensi penyebab secara

langsung yaitu seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal atau pihak lain. Resistensi yang secara tidak langsung dilakukan melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi mampu mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan resistensi yang dilakukan secara terang-terangan.

a. Menolak Relokasi

Pemindahan lokasi atau relokasi merupakan suatu tindakan pemerintah dalam upaya menertibkan keberadaan pedagang kaki lima untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang telah disediakan oleh pemerintah. Adanya relokasi berawal dari perpindahan pedagang yang berada di pasar kota untuk berpindah ke pasar sentral yang telah dibangun oleh Walikota Kendari, dalam konsep pasar sehat yang bergaya modern. Hampir semua pedagang yang berada di pasar kota lama akan dipindahkan ke dalam pasar sentral tersebut, dengan mensubsidikan warung mereka yang telah terbakar saat itu, sehingga para pedagang yang akan pindah di pasar sentral akan mendapatkan potongan harga hingga 50% untuk pembelian atau biaya sewa tempat yang ada di dalam pasar sentral tersebut, namun potongan ini sesuai dengan kondisi warung pedaganng yang lama, pedagang yang mempunyai bangunan permanen akan mendapatkan potongan 50%, sedangkan bagi pedagang yang warungnya non permanen hanya mendapatkan potongan harga 25% samapai 20% saja.

b. Resistensi Terbuka

Sektor informal selalu dibatasi oleh kebijakan pemerintah, bahwa biasanya dalam melakukan resistensi, selalu ada dalam pihak yang unggul. Ini dapat kita tangkap dari banyaknya penertiban yang dilakukan, keberadaan sektor informal tidaklah berkurang tetapi justru bisa bertambah. Resistensi rakyat menurut Scott dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu resistensi yang disebabkan oleh penyebab secara langsung dan penyebab tidak langsung.

Resistensi rakyat karena penyebab secara langsung seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal atau pihak lain. Resistensi yang secara tidak langsung dilakukan melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi, resistensi secara sembunyi-sembunyi mampu mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan resistensi yang dilakukan secara terang-terangan. Strategi resistensi terbuka yang dilakukan sektor informal ini merupakan salah satu strategi yang paling sering digunakan ketika para PKL ini tidak sempat lagi memindahkan barang-barang jualan satu persatu sehingga memindahkan gerobak mereka ke halaman orang menjadi salah satu alternatif bagi mereka, karena dengan begitu barang jualan mereka tidak akan terkena razia atau disita oleh petugas Satpol PP. Scoot mendefinisikan beberapa bentuk resistensi terbuka yang sering di lakukan oleh sektor informal ataupun masyarakat kecil yang mengalami penindasan.

Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak bertindak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya, misalnya munculnya Peraturan Walikota No, 13 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam kelangsungan hidupnya. Akibatnya, para PKL merasa menjadi sebuah kelompok yang terpinggirkan dan dianggap sebagai penentang kebijakan pemerintah, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang sepihak.

Strategi resistensi terbuka yang dilakukan sektor informal ini merupakan salah satu strategi yang paling sering digunakan ketika para PKL ini tidak sempat lagi memindahkan barang-barang jualan satu persatu sehingga memindahkan gerobak mereka ke halaman orang menjadi salah satu alternatif bagi mereka, karena dengan begitu barang jualan mereka tidak akan terkena razia atau disita oleh petugas Satpol PP. Scoot mendefinisikan beberapa bentuk

resistensi terbuka yang sering di lakukan oleh sektor informal ataupun masyarakat kecil yang mengalami penindasan.

Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak bertindak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya, misalnya munculnya Peraturan Walikota No, 13 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Dalam kelangsungan hidupnya, para PKL merasa menjadi sebuah kelompok yang terpinggirkan dan di anggap sebagai penentang kebijakan pemerintah, di tambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang sepihak. PKL tidak diberikan ruang dan tempat sehingga hak-hak mereka sebagai bagian dari kelompok sosial seakan dirampas dengan adanya aturan penertiban tersebut. Kepentingan dan tujuan menyebabkan ikatan yang kuat antara sesama pedagan kaki lima, desakan ekonomi dan kebutuhan hidup membuat mereka harus menempuh berbagai strategi sebagai tandingan kebijakan-kebijakan pemerintah. Resistensi terbuka merupakan resistensi yang dilakukan secara terang-terangan pada masyarakat kecil dalam mempertahankan suatu tindakan yang dilakukan pada mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang berada di Pasar Sentral Kota Kendari, dalam mempertahankan barang dagangan mereka dari razia Satpol PP.

c. Negosiasi Tempat

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan bekerja manusia dapat menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian sektor informal yang menjadi obyek penelitian, mereka bekerja terus menerus tiap harinya, dengan cara berdagang mereka mencoba mencari nafkah untuk keluarga dan memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Menjadi pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang mudah dilakukan dan se-

bagian besar dilakukan oleh sektor informal yang tidak mempunyai pekerjaan menetap.

Dengan bermodalkan gerobak sebagai tempat menyimpan barang dan jalan sebagai pijakan untuk berjualan. Pada umumnya pedagang kaki lima berjualan di sembarang tempat yang mereka anggap tempat tersebut strategis dan ramai, agar barang dagangan mereka mudah terlihat oleh orang yang kemudian orang tersebut tertarik untuk melihat-lihat barang mereka. Tempat yang terbuka mampu menciptakan daya tarik kepada orang-orang yang hanya sekedar lewat untuk mampir untuk membeli barang yang mereka jual. Namun para pedagang kaki lima ini melanggar aturan yang telah di buat oleh Undang-undang yang mengatur tentang tata ke Indahan Kota.

Negosiasi merupakan suatu interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan saling bertentangan, negosiasi juga adapat sering dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk meminta izin atau menawar sesuatu dari orang lain. Seperti halnya para pedagang kaki lima yang berjualan di wilayah pasar sentral Kota Lama ini.

c. Resistensi Terselubung (Tertutup)

Sektor informal merupakan sektor yang selalu menjadi korban kebijakan pemerintah yang terkadang semakin mendesak keberadaan dan membuat mereka tertekan. Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal merasa sangat dirugikan dengan keberadaan kebijakan pemerintah dalam Tata Indah Kota. Scott (2000, 287-387) mengungkapkan bahwa ada perbedaan perspektif antara resistensi sungguh-sungguh di satu pihak dengan tanda-tanda kegiatan yang bersifat insidental atau aksi kecil-kecilan (terselubung).

Resistensi yang sesungguhnya bersifat; (1) terorganisasi, sistematis dan kooperatif; (2) Berprinsip atau tanpa pamrih; (3) mempunyai akibat akibat revolusioner;

(4) mengandunggagasan dan tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sedangkan yang bersifat kecil-kecilan (terselubung), insidental dan gejala kejahatan sekunder adalah; (1) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual; (2) bersifat untung-untungan dan berpamrih; (3) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan (4) dalam maksud dan logikanya mengandung arti dan penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada.

Resistensi terselubung, merupakan resistensi yang sama pada umumnya, yaitu perlawanan yang dilakukan para pedagan kaki lima terhadap razia Satpol PP hal ini juga merupakan strategi pedagang untuk bertahan dari razia yang dilakukan Satpol PP. Resistensi tertutup ini sering terjadi, biasanya PKL mengomel sendiri atau bahkan membicarakan suatu hal yang buruk tentang petugas kepada sesama PKL, sebagian PKL merasakan hal ini merupakan cara paling aman, di samping tidak terdengar oleh petugas hal ini juga terhindar dari bentrok fisik secara langsung.

Pada umumnya resistensi terselubung yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan cara resistensi ini dilakukan pedagang kaki lima cara tertutup atau sembunyi-sembunyi, biasanya para pedagang kaki lima bekerja sama dengan orang lain untuk memata-matai oknum Satpol PP ketika akan melakukan razia di daerah pedagang kaki lima, sama halnya yang telah di lakukan oleh pedagang kaki lima yang berada di Pasar Sentral Kota Lama Kendari ini, mereka bekerja sama dengan tukang ojek yang berada di sekitar pasar tersebut. Strategi tersebut di lakukan ketika adanya razia Satpol PP, ketika oknum Satpol PP sudah memasuki area pasar maka tukang ojek langsung segera menginformasikan kepada para pedagang kaki lima untuk merapikan jualan mereka.

D. PENUTUP

Penggunaan ruang publik oleh PKL menyebabkan suatu permasalahan bagi pe-

merintah daerah. Banyaknya pengangguran yang sulit mendapatkan kerja akibat beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat mereka harus memasuki sektor informal sebagai pedagang kaki lima yang menjadi salah satu alternatif untuk mencari nafkah. Selain itu menjadi pedagang kaki lima tidaklah membutuhkan modal yang banyak dan dapat membuka lapak dimana saja yang dianggap strategis sehingga banyak dari sektor informal yang berada di Kota Kendari mengalihkan aktifitasnya ke pekerjaan tersebut dan membuka lapak di sekitaran Pasar Sentral Kota Kendari yang bergaya modern. Para PKL menggunakan badan jalan sebagai pijakan untuk membuka lapak ataupun menempatkan gerobak yang berisi barang jualan.

Namun lokasi yang di gunakan oleh para pedagang kaki lima tersebut sangat mengganggu arus lalu lintas yang lalu-lalang di wilayah tersebut. Selain itu, hal tersebut juga sangat tidak diperbolehkan, karena di dalam UU Perwali Kota Kendari No 13 Tahun 2008 tertulis tentang kebersihan dan keindahan. Sehingga oknum Satpol PP diharuskan untuk melakukan razia oleh para pedagang kaki lima yang berjualan di wilayah pasar sentral Kota. Razia yang dilakukan oleh pemerintah dan dibantu oleh para petugas Satpol PP yang berlandaskan UU Perwali yang bagi beberapa PKL tidak sesuai dengan kondisi mereka saat ini yang mengharuskan mereka untuk menjajakan dangangan di ruang publik mengharuskan mereka melakukan resistensi. Dengan melakukan resistensi para pedagang mempertahankan lokasi berjualan serta barang dagangan yang akan disita apabila mereka terjaring razia ketika kedatangan sedang berjualan ditempat dan menggunakan fasilitas umum yang tidak diperuntukan untuk kegiatan mereka. Hal ini mereka lakukan karena mereka merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari, sehingga para

pedagang ini melakukan perlawanan terus menerus kepada Oknum Satpol PP.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian ini adalah:

- a. Sebaiknya PKL lebih berusaha untuk koperatif terhadap peraturan daerah yang berlaku yang mengatur kebersihan dan keindahan fasilitas umum kota. Pedagang Kaki Lima harus berusaha untuk berjualan di tempat yang telah ditetapkan dan menjaga kebersihan dan keindahan di tempat tempat yang telah ditetapkan untuk berjualan. Perlu dimunculkan kesadaran bahwa ketika mereka berjualan di tempat yang mengganggu kepentingan umum seperti di bahu jalan adalah kesalahan.
- b. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Kendari lebih bijak dan lebih tegas lagi dalam menangani dan mener-tibkan Pedagang Kaki Lima supaya Kota Kendari menjadi lebih tertata dan tidak rawan kemacetan terutama di kawasan-kawasan sekitar pasar.
- c. Sebaiknya pemerintah mengakomodir dan memfasilitasi PKL untuk berjualan dengan menyediakan tempat berjualan yang layak, masalah yang selama ini menjadi kendala bagi Pedagang Kaki Lima adalah mahalnya menyewa toko untuk berjualan. Perlu adanya jalan tengah agar kedua pihak mampu berjalan beriringan, mengingat Pedagang Kaki Lima merupakan aset yang jika dikelola dengan baik mampu menjadi penggerak perekonomian di Kota Kendari.
- d. Pemerintah seharusnya juga memperhatikan orang-orang kecil, seperti pedagang kaki lima agar mereka tidak merasa dirugikan. Menempatkan pedagang kaki lima di satu lokasi yang layak serta penyewaan tempat dan bangunan yang tidak terlalu mahal agar pedagang-

pedagang tersebut bisa memutar kembali modal dan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwin Hasibuan. 2013. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP) dalam Penegakan Peaturan Daerah di Kota Medan." Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Benjamin. 2013. "Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Eko Siswono. 2010. "Resistensi dan Akomodasi: Suatu Kajian Tentang Hubungan-Hubungan Kekuasaan pada Pedagang Kaki Lima (PKL), Preman dan Aparat di Depok", Skripsi: Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Depok.
- Firdausy, C. M. 1995. *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: LIPI
- Haedt Michael A. Negri dkk. 2004. *War and Democrcy in the Age of Empire*.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hart, Keith, 1991 Sektor Informal, (dalam Chris Manning, dkk), *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Law Treats Non-Muslims" dalam Novita Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo, Yogyakarta: Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajamadah.
- Mirdaliana. 2016. "Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Perda dan Penertiban Satpol PP Dalam Penataan Kota. (Studi kasus Pasar Babu Kuning Bandar Lampung). Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung".
- Mochammad Fadoli. 2011. "Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo". Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran.
- Muhammad Khoirul Bashor. 2016. "Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember (Tinjauan Peaturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah). Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peraturan Walikota Walikota No, 13 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- Ryzza Dwi Erlinda. 2014. "Kajian Yuridis tentang Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik di Wilayah Kabupaten Jember".
- Scott, James. 1976. *The Moral Economy of The Peasant*. Ulasan Buku oleh: Victor T. King.
- Scott, James. 2003. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah; Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan (1996:33) (dalam Alisjahbana, 2005:90). 2001. *Pengantar Ke arah Sejarah dan Teori Sosiologi*. Yogyakarta: IKIP Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Wa Ode Gusriani. 2009 Antropologi FIB UHO. "*Kehidupan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perempuan. Studi pada Penjualan Pakaian bekas (RB) di Pasar Baru Wua-wua Kota Kendari*". Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Antropologi Universitas Halu Oleo.